



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA KABUPATEN PESAWARAN 2021





INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA KABUPATEN PESAWARAN 2021

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA KABUPATEN PESAWARAN 2021

ISBN :
Nomor Publikasi : 18090.2225
Katalog BPS : 2302004.1809

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 66 halaman

Naskah :
BPS Kabupaten Pesawaran

Gambar Kulit :
BPS Kabupaten Pesawaran

Diterbitkan oleh :
@ BPS Kabupaten Pesawaran

Dicetak oleh :
BPS Kabupaten Pesawaran

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Sugiarto

Penyunting:

Lusi Oktari

Abdul Kadir

Penulis:

Henida Widyatama

Lia Gustina

Infografis:

Wahyu Ahmad Kautsar

<https://pesawarankab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Pesawaran memerlukan dukungan data yang lengkap dan berkesinambungan untuk kepentingan evaluasi sekaligus bahan perencanaan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran 2021 menyajikan beberapa indikator ketenagakerjaan. Data yang disajikan sesuai dengan *Key Indicators of Labour Market* (KILM).

Dalam kedudukannya sebagai sebuah media informasi, publikasi ini memuat analisis dan indikator yang menggambarkan keadaan terkini pasar ketenagakerjaan di Kabupaten Pesawaran, dimana data yang digunakan sebagian besar adalah data yang dihitung dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan lapangan Sakernas Februari dapat menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.

Atas terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif telah ikut memberikan kontribusinya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Gedong Tataan, Desember 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesawaran

Ir. Sugiarto

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN	3
1.2 SAKERNAS DAN KILM.....	4
1.3 PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN	6
1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM	9
BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA.....	13
KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	15
KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA (<i>EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR</i>)	17
KILM 3. PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA	19
KILM 4. PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	20
KILM 5. PENDUDUK BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA.....	21
KILM 6. PEKERJA PARUH WAKTU	23
KILM 7. PENDUDUK BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA	26
KILM 8. PENDUDUK BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL.....	27
BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN	31
KILM 9. PENGANGGURAN.....	33
KILM 10. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA .	36
KILM 12. SETENGAH PENGANGGURAN (<i>UNDEREMPLOYMENT</i>)	37
BAB 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA.....	39
KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN	41

BAB 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	43
KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	45
BAB 6 INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA.....	47
KILM 15. UPAH DAN BIAYA KOMPENSASI	49
PENJELASAN TEKNIS.....	51

<https://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020-2021	20
Tabel 2. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020-2021	21
Tabel 3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, 2020-2021	22
Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesawaran, 2021	33
Tabel 5. Tingkat Ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021	41
Tabel 6. Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai di Kabupaten Pesawaran (Rupiah), 2020-2021	49

<https://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2019-2021	15
Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2021	15
Grafik 3. TPAK Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021	16
Grafik 4. <i>Employment to Population Ratio (EPR)</i> , 2019-2021	17
Grafik 5. <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021	18
Grafik 6. <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung, 2021	19
Grafik 7. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021	23
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (Persen), 2019-2021	24
Grafik 9. Perbandingan Tingkat Pekerja Paruh Waktu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021	25
Grafik 10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Kabupaten Pesawaran, 2021	26
Grafik 11. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Lampung, 2021	27
Grafik 12. Persentase Penduduk Bekerja Formal dan Informal di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021	28
Grafik 13. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021	29
Grafik 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021	34
Grafik 15. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021	35
Grafik 16. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021	36
Grafik 17. TPT Penduduk Umur Muda di Kabupaten Pesawaran, 2020	37
Grafik 18. Penduduk umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur di Kabupaten Pesawaran, 2020	38
Grafik 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja mencapai 223 ribu penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Pesawaran sebesar 65,42 persen.

Angka *Employment to Population Ratio (EPR)* Kabupaten Pesawaran pada Agustus 2021 sebesar 62,68 persen. Angka EPR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 62 orang yang bekerja pada bulan Agustus 2021. Angka ini menurun dari tahun 2020, 66,27 persen.

Persentase terbesar penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2021 di Kabupaten Pesawaran adalah berusaha. Persentase penduduk bekerja dengan status berusaha sebesar 43,76 persen. Status berusaha tersebut terdiri dari 0,99 persen pengusaha, 20,52 persen berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, serta 22,26 persen pekerja bebas.

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Pesawaran pada Agustus 2021 masih mempunyai pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu didominasi oleh sektor pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 89 ribu jiwa.

Hasil Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu di Kabupaten Pesawaran mencapai 32,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 32 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja).

Mayoritas penduduk di Kabupaten Pesawaran bekerja di bawah 35 jam per minggu, yaitu sebesar 45,48 persen. Penduduk Kabupaten Pesawaran sebesar 34,31 persen bekerja dengan jam kerja 35-48 jam per minggu, serta 20,21 persen dengan jam kerja 49 jam ke atas per minggu.

Kabupaten Pesawaran didominasi penduduk yang bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 76,69 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan angka tahun 2020, yaitu 76,89 persen.

Kondisi Agustus 2021, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pesawaran sebesar 4,19 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran, terdapat sekitar 4 orang yang masuk kategori pengangguran. TPT perempuan di Kabupaten Pesawaran lebih tinggi dari pada TPT laki-laki. TPT Perempuan sebesar 4,35 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 4,10 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, TPT penduduk umur muda di Kabupaten Pesawaran sebesar 15,33 persen. TPT penduduk umur muda perempuan sebesar 13,54 persen, sedangkan TPT penduduk umur muda laki-laki sebesar 16,63 persen.

Jumlah setengah penganggur di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah setengah penganggur pada Agustus 2021 sekitar 21,8 ribu penduduk.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, di Kabupaten Pesawaran, terdapat 34,58 persen penduduk yang bukan angkatan kerja. Artinya, dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Pesawaran, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sekitar 35 orang.

Pada tahun 2021, Angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran didominasi oleh mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar ke bawah. Angkatan kerja yang menamatkan pendidikan dasar ke bawah sebesar 60,40 persen. Angkatan kerja yang menamatkan pendidikan menengah sebesar 32,34 persen. Sementara itu, angkatan kerja yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 7,25 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai di Kabupaten Pesawaran sebesar 2,16 juta rupiah. Pada tahun tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata upah/gaji menurun menjadi 2,22 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji bersih yang diterima buruh/karyawan laki-laki lebih besar dari pada yang diterima buruh/karyawan perempuan.

BAB 1

PENDAHULUAN

SAKERNAS

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan



PENDUDUK USIA KERJA

Batas penduduk usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun ke atas

KILM

Alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja



Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Pesawaran. Penyusunan Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia khususnya di Kabupaten Pesawaran.

1.1 SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 – 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 – 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus. Sementara itu, tahun 2002 – 2004 selain secara

tahunan, juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 – 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 – 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan. Mulai tahun 2015 sampai sekarang, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Besarnya sampel Sakernas Agustus 2021 sebanyak 300.000 rumah tangga. Pada Sakernas Agustus 2021, setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap Anggota Rumah Tangga (ART), yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan status perkawinan (khusus untuk 10 tahun ke atas). Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat

dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error-nya*.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan Agustus 2021 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, hingga saat ini, petugas

Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, di mana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan,

untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3 PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain. Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 9, 10, dan KILM 12), juga dapat menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan dari indikator bukan angkatan kerja (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas pekerjaan sehingga disebut "layak" dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama, lapangan pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama (KILM3, KILM 4, dan KILM 5); jam kerja yang berlebih /*exceeds working hours* pada indikator penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja (KILM 7); penduduk yang bekerja di sektor informal (KILM 8); dan setengah pengangguran (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs adalah tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan secara global, tujuan ini merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun

2015. Sakernas sebagai salah satu sumber data penyusun indikator SDGs diharapkan dapat memenuhi informasi yang diperlukan.

Indikator SDGs yang dapat dihasilkan dari Sakernas diantaranya:

- Proporsi wanita yang memegang jabatan manajerial.
- Proporsi pekerjaan informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.
- Pendapatan rata-rata per jam dari pekerja perempuan dan laki-laki, menurut pekerjaan, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.
- Tingkat pengangguran, berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.
- Proporsi penduduk muda (15-24 tahun) yang tidak sedang mengikuti pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).
- Persentase jumlah anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak, menurut kelompok jenis kelamin dan umur.
- Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin.
- Pekerja sektor manufaktur sebagai proporsi dari total pekerja.

3) Memantau Kesetaraan Gender di Pasar Tenaga Kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan

upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Dewasa ini, semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional, statistik ketenagakerjaan. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan angka pengangguran yaitu relatif lebih mudah dalam hal pengumpulan data dan komparasi antar daerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Langkah pertama dalam menganalisis kondisi pasar kerja adalah membagi penduduk dalam dua kategori, yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Batas penduduk usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi dua kategori yaitu yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja-KILM 1) dan yang tidak aktif dalam perekonomian (bukan angkatan kerja-KILM 13). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja (KILM 2) dan menganggur (KILM 9).

Kualitas angkatan kerja bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas relatif semakin baik (KILM 14). Apabila di suatu negara, banyak penduduk yang masuk kategori pengangguran atau bukan angkatan kerja maupun keduanya, menunjukkan adanya masalah tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan (*underutilized*). Dalam menghadapi situasi tersebut pemerintah seharusnya berusaha untuk menganalisis apa alasan penduduk tidak aktif di pasar kerja, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat. Apabila diketahui mayoritas bukan angkatan kerja adalah perempuan, dan alasannya karena perempuan

memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga, pemerintah mungkin dapat membuat kebijakan yang dapat mendorong perempuan masuk ke pasar kerja. Misalnya dengan membangun pusat-pusat penitipan anak, memberikan jam kerja yang lebih fleksibel terhadap perempuan, dan lain-lain.

Untuk mereka yang tidak aktif pada pasar kerja karena penyandang cacat (disabilitas), pemerintah bisa membuat peraturan agar tiap perusahaan harus mempekerjakan penyandang cacat atau bisa memberikan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan/gedung perkantoran sehingga memudahkan mereka untuk bekerja.

Masalah yang lebih sulit dipecahkan oleh pemerintah adalah bagaimana cara mengembalikan orang yang “putus asa” (*discourage worker*) masuk kembali ke pasar kerja. Hal tersebut disebabkan karena orang yang “putus asa” merasa tidak ada pekerjaan yang sesuai, atau kualifikasi mereka kurang, atau bahkan mereka tidak tahu kemana harus mencari kerja. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah bisa membuat pelatihan-pelatihan kerja sesuai minat dan kemampuan mereka, atau membuat lembaga yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi mereka.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal (perkotaan-perdesaan), tingkat pendidikan (KILM 9), dan kelompok umur muda (KILM 10), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi dan pengalaman kerja (bila tersedia). Karakteristik tersebut juga penting untuk dianalisis, sehingga dapat dicari akar masalahnya dan bisa diberikan solusi kebijakan yang tepat. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan kemiskinan yang substansial di suatu negara, sementara tingkat pengangguran yang tinggi bisa terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Di negara-negara berkembang umumnya tidak tersedia jaminan perlindungan sosial (misalnya: asuransi pengangguran dan tunjangan kesejahteraan). Akibatnya mereka yang relatif “kaya” yang mampu menganggur. Pengangguran adalah barang mewah, hanya mereka yang mempunyai tabungan atau pendapatan di luar pekerjaan (*non-labor income*) yang bisa menganggur. Sementara mereka yang miskin, tidak bisa

menganggur, mereka harus bekerja apa saja untuk dapat hidup (*too poor to be unemployed*).

Sehingga penting untuk menelaah dari total penduduk bekerja di Indonesia, berapa banyak yang mempunyai pekerjaan yang layak. Pekerjaan layak adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan atau pilihan sendiri, memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta menjamin keselamatan fisik maupun psikologis. Kelayakan pekerjaan dapat dilihat dari status pekerjaan seseorang (KILM 3), apakah dia sebagai buruh/karyawan yang cenderung mempunyai penghasilan tetap atau hanya sebagai pekerja bebas pertanian yang penghasilannya tidak menentu. Lapangan pekerjaan (KILM 4), jenis pekerjaan (KILM 5), pekerja paruh waktu (KILM 6), jumlah jam kerja (KILM 7), sektor informal (KILM 8), dan setengah penganggur (KILM 12) dapat dijadikan indikator untuk melihat seberapa layak pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut sejahtera atau tidak dapat dilihat dari upah/pendapatannya (KILM 15).

BAB

2

PARTISIPASI & INDIKATOR TENAGA KERJA

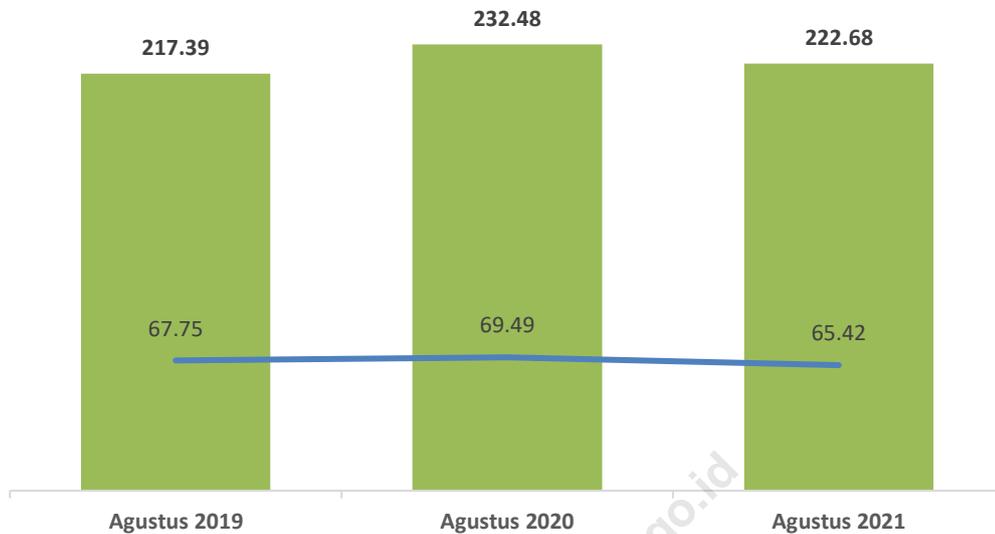


Terjadi penurunan
jumlah angkatan kerja
sekitar 10 ribu
penduduk

Tingkat Parsipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Pesawaran
sebesar 65,42 persen

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

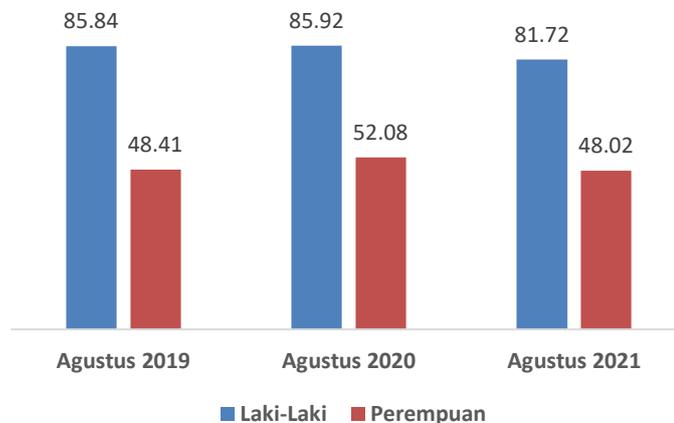
“Terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dan TPAK”



Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2019-2021

Hasil Sakernas Agustus 2021 di Kabupaten Pesawaran menunjukkan adanya penurunan sekitar 10 ribu penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, dibandingkan dengan Sakernas Agustus 2020. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Pesawaran juga mengalami penurunan empat persen dibandingkan Agustus 2020. TPAK Kabupaten Pesawaran pada Agustus 2021 sebesar 65,42 persen.

“TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan.”



Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2021

Dari waktu ke waktu, secara umum, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Kondisi ini selalu sama dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, TPAK laki-laki lebih tinggi sekitar 1,7 kali TPAK perempuan.

TPAK laki-laki di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 sebesar 81,72 persen, sedangkan TPAK perempuan 48,02 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja ada sekitar 81 sampai 82 orang. Sementara itu, dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 48 orang yang termasuk angkatan kerja.

“TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Barat”



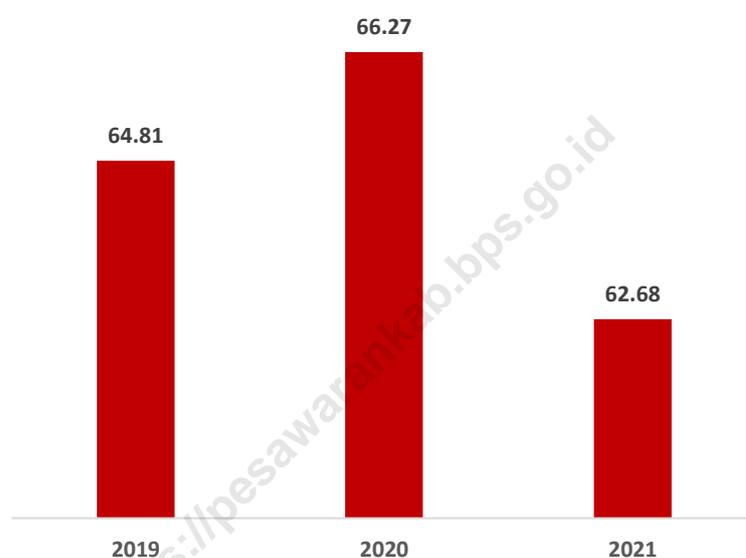
Grafik 3. TPAK Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021

Pada Grafik 3 terlihat persebaran TPAK kabupaten/kota di Provinsi Lampung, ada sebanyak lima kabupaten dengan TPAK lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK provinsi. Kelima kabupaten dengan TPAK tertinggi berturut-turut, yaitu Kabupaten Lampung Barat (83,23 persen), Way Kanan (74,78 persen), Pesisir Barat (74,62 persen), Tulang Bawang Barat (72,32 persen), dan Lampung Tengah

(72,26 persen). Sementara itu, TPAK Pesawaran masih di bawah TPAK Provinsi Lampung.

KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

“Terjadi penurunan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR) selama setahun terakhir”



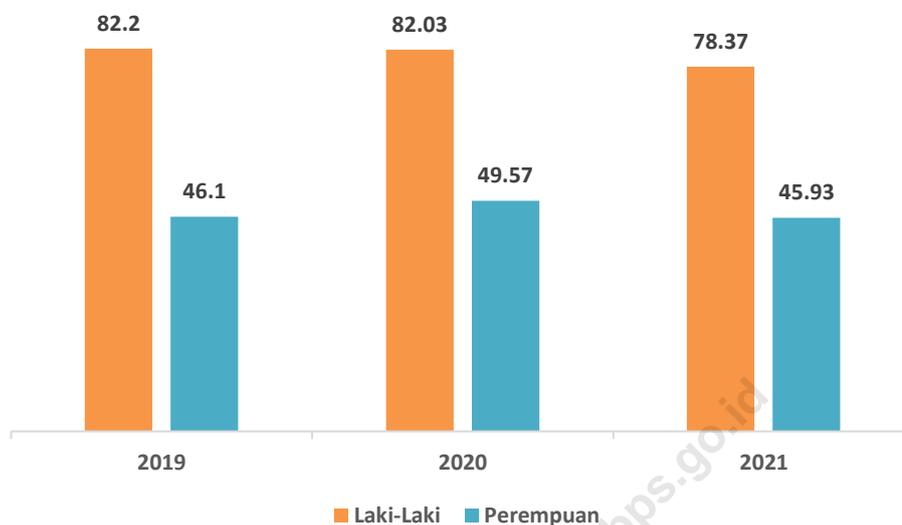
Grafik 4. *Employment to Population Ratio (EPR)*, 2019-2021

Salah satu indikator penting dalam pasar tenaga kerja adalah EPR. Berdasarkan Sakernas Agustus 2021, EPR Kabupaten Pesawaran sebesar 62,68 persen. Dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 62 orang yang bekerja. EPR mengalami penurunan setelah tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi pengurangan penyerapan penduduk bekerja dari seluruh penduduk usia kerja.

“EPR laki-laki lebih tinggi dari pada EPR perempuan”

Seperti yang terlihat pada Grafik 5, apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 1,7 kali dibandingkan dengan EPR

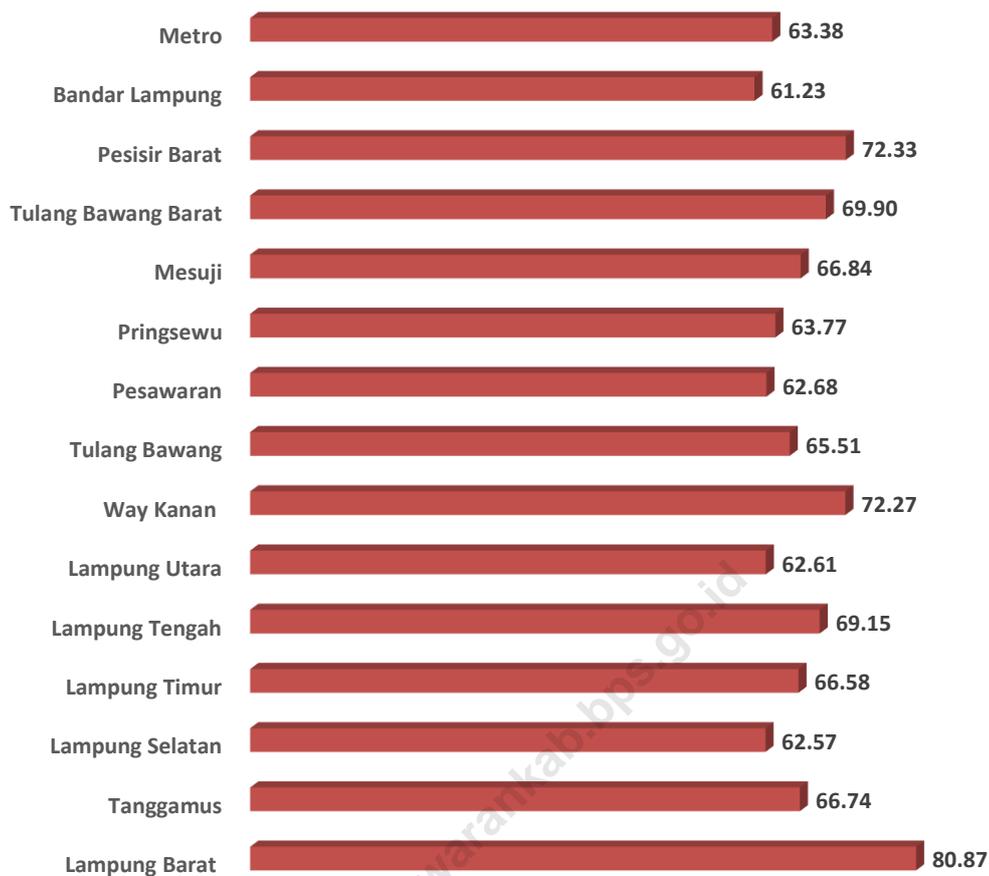
perempuan. Kondisi yang sama dalam 3 tahun terakhir, baik pada Agustus 2019, maupun juga pada Agustus 2020. EPR laki-laki pada Agustus 2021 sebesar 78,37 persen, sedangkan EPR perempuan hanya 45,93 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, EPR laki-laki maupun EPR perempuan menurun.



Grafik 5. *Employment to Population Ratio* Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021

“Agustus 2021: EPR tertinggi di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Barat”

EPR Lampung pada Agustus 2021 sebesar 66,10 persen. Grafik 6 menunjukkan kabupaten/kota dengan EPR tertinggi pada (Agustus) 2021, yaitu Kabupaten Lampung Barat dengan EPR sebesar 80,87 persen. Sementara itu, Kota Bandar Lampung merupakan kabupaten/kota dengan EPR terendah yaitu 61,23 persen.



Grafik 6. *Employment to Population Ratio* Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung, 2021

KILM 3. PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

“Hampir sebagian besar penduduk bekerja di Kabupaten Pesawaran berstatus berusaha”

Tabel 1 menunjukkan bahwa distribusi penduduk bekerja yang dirinci berdasarkan status pekerjaan utama, mempunyai pola yang tidak jauh berbeda jauh, antara 2020 dan 2021. Penduduk bekerja di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 didominasi oleh mereka yang berstatus berusaha (43,76 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (22,32 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar

19,80 persen dan mereka dengan status pekerja bebas (14,12 persen) yang berada pada urutan terakhir.

Tabel 1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020-2021

Status Pekerjaan Utama	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	21.33	22.32
Berusaha	46.93	43.76
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar (Pengusaha)	1.79	0.99
Berusaha Sendiri	19.63	20.52
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	25.52	22.26
Pekerja Bebas	12.07	14.12
Pekerja Keluarga	19.67	19.80
Total	100.00	100.00

Pembahasan mengenai penduduk yang bekerja dengan status berusaha dapat ditinjau dari tiga kategori yaitu pengusaha, berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Pada tahun 2021, persentase pengusaha turun menjadi 0,99 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 22,26 persen, dan berusaha sendiri meningkat menjadi sebesar 20,52 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, 2020, terjadi peningkatan persentase pada penduduk yang bekerja dengan upah dan gaji, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Penurunan terjadi pada mereka yang berusaha.

KILM 4. PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

“Mayoritas penduduk Kabupaten Pesawaran bekerja di kategori pertanian”

Struktur lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Pesawaran menunjukkan pola yang tidak berbeda pada tahun 2020 dan 2021, yang masih didominasi oleh kategori pertanian. Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang bekerja di kategori

pertanian menurun menjadi sekitar 89 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di kategori jasa juga menurun sekitar dua ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitupun dengan lapangan pekerjaan utama pada kategori Manufaktur yang turun menjadi sekitar 37 ribu jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020-2021

Lapangan Pekerjaan Utama	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Pertanian	94 677	88 900
Manufaktur	37 639	37 181
Jasa	89 376	87 280
Total	221 692	213 361

KILM 5. PENDUDUK BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA

“Mayoritas penduduk Lampung bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan.”

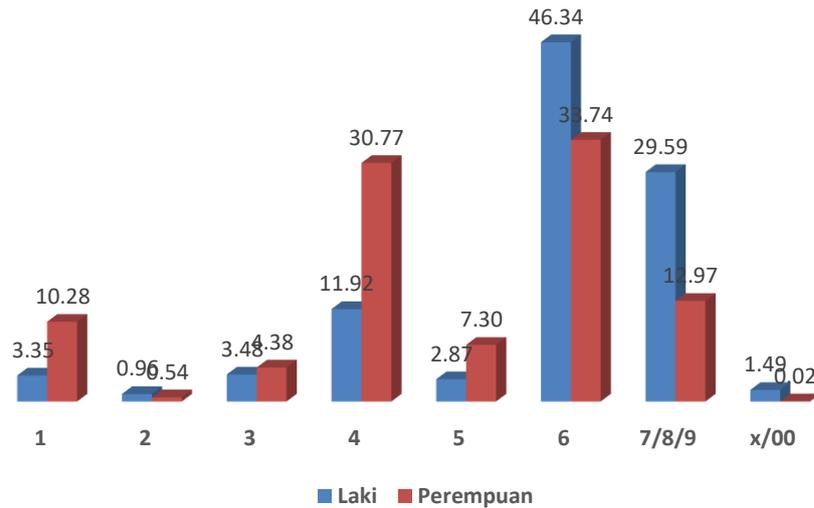
Proporsi penduduk bekerja berdasarkan jenis pekerjaan utama pada Agustus 2021 masih mempunyai pola yang sama dengan periode sebelumnya, Agustus 2020. Sebagai gambaran, penduduk bekerja pada tahun 2021 didominasi oleh tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan persentase sebesar 41,72 persen. Selain itu, banyak juga penduduk yang bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar (23,49 persen), serta tenaga usaha penjualan (18,84 persen).

Tabel 3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung, 2020-2021

No	Jenis Pekerjaan Utama	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis	5.40	5.89
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0.62	0.80
3	Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	3.67	3.81
4	Tenaga Usaha Penjualan	18.43	18.84
5	Tenaga Usaha Jasa	4.76	4.50
6	Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	43.68	41.72
7	Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	22.51	23.49
8	Lainnya	0.93	0.95
Total		100.00	100.00

“Pada Agustus 2021, penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung paling banyak bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan”

Ditinjau menurut jenis kelamin, pada Sakernas Agustus 2021, persentase tertinggi penduduk laki-laki bekerja pada tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 46,34 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 33,74 persen. Hal ini menunjukkan lebih dari sepertiga jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan di Provinsi Lampung bekerja pada jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Jenis pekerjaan tersebut sangat dominan dibandingkan jenis pekerjaan lainnya baik pada laki-laki maupun perempuan.



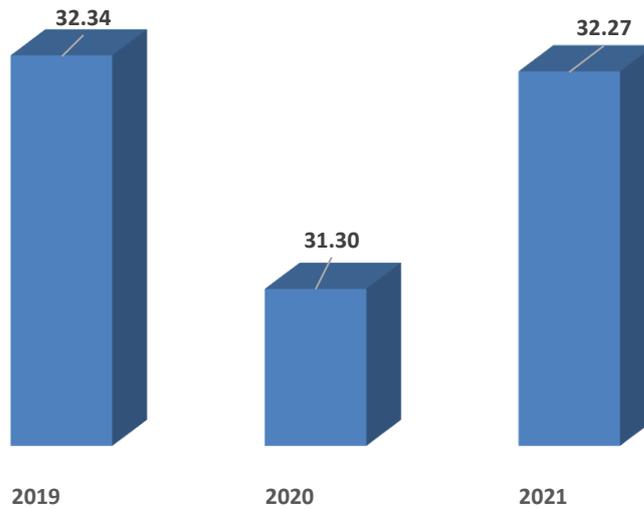
1 Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis ; 2 Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan; 3 Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis ; 4 Tenaga Usaha Penjualan; 5 Tenaga Usaha Jasa; 6 Tenaga Usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan; 7/8/9 Tenaga Produksi , Operator Alat-Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar; X/00 Lainnya .

Grafik 7. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021

KILM 6. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi, penting mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, sebagai persentase dari total penduduk bekerja. Walaupun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu, tetapi mereka tidak sedang mencari dan mempersiapkan usaha. Selain itu, pekerja paruh waktu juga tidak bersedia jika ada yang menawarkan pekerjaan lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja paruh waktu belum tentu termasuk golongan dari pekerja yang tidak layak.

“Agustus 2021 : Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 32,27 persen”

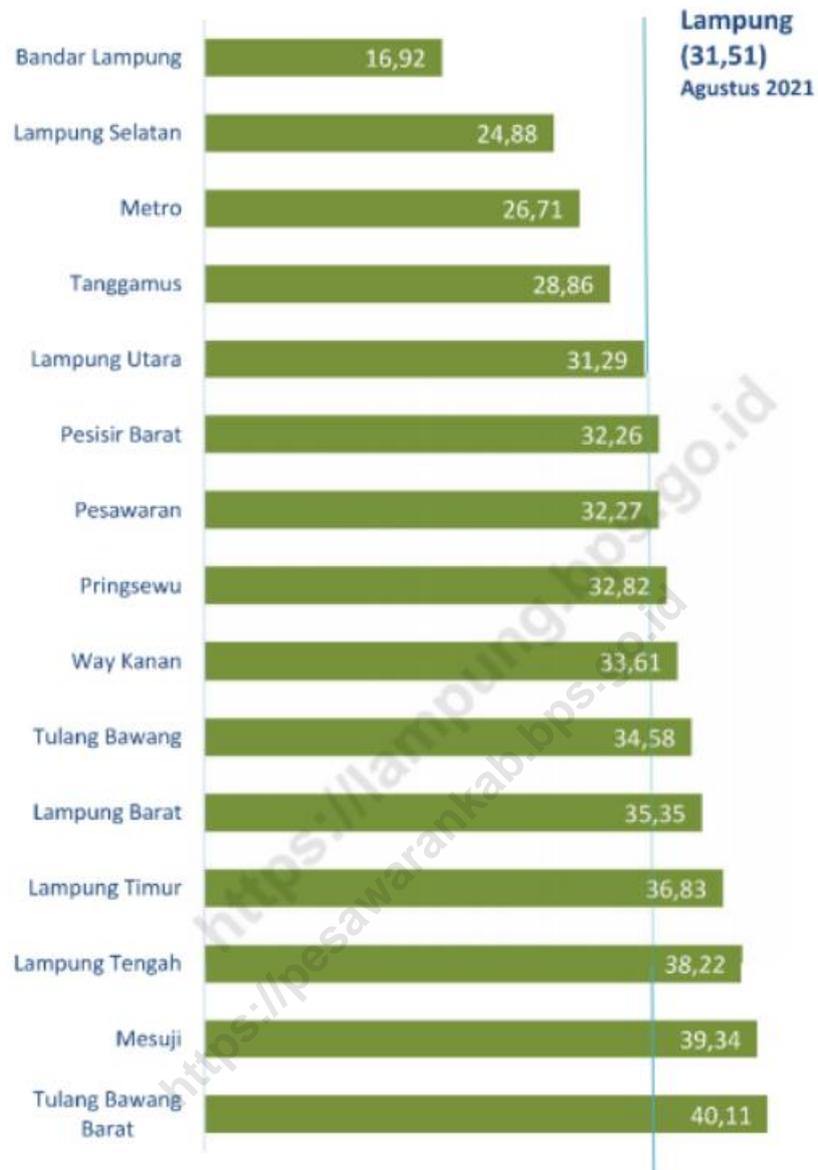


Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (Persen), 2019-2021

Hasil Sakernas Agustus 2021, tingkat pekerja paruh waktu di Kabupaten Pesawaran sebesar 32,27 persen. Dapat dikatakan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 32 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja). Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Agustus 2020.

“Agustus 2021 : Tingkat pekerja paruh waktu di Kabupaten Pesawaran lebih besar dari Provinsi Lampung”

Tingkat pekerja paruh waktu di Provinsi Lampung sebesar 31,51 persen, lebih rendah dari tingkat pekerja paruh waktu di Kabupaten Pesawaran. Tingkat kerja paruh waktu tertinggi di Provinsi Lampung berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu sebesar 40,11 persen. Sementara itu, tingkat kerja paruh waktu terendah di Kota Bandar Lampung, sebesar 16,92 persen.

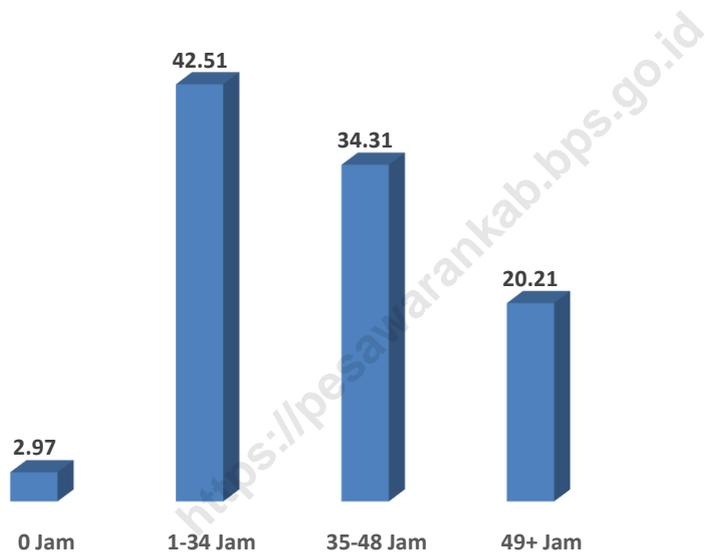


Grafik 9. Perbandingan Tingkat Pekerja Paruh Waktu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021

KILM 7. PENDUDUK BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

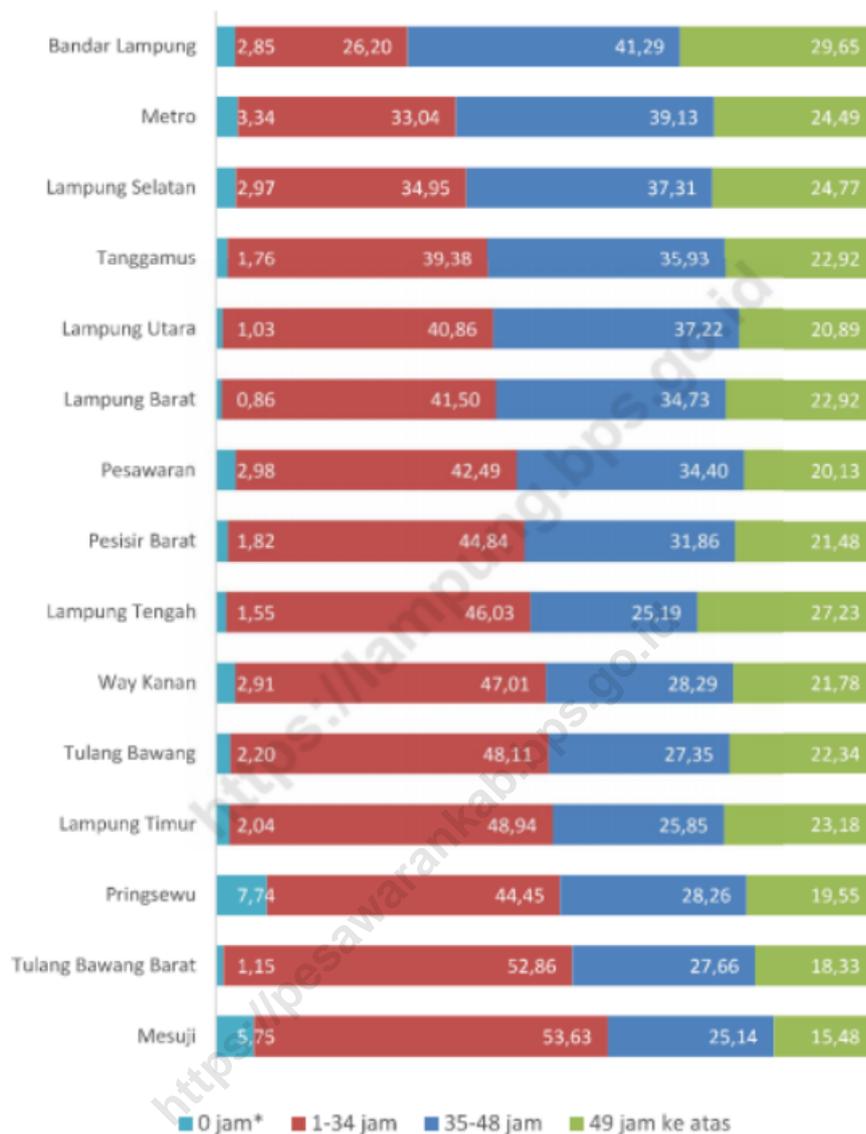
“Agustus 2021: Mayoritas penduduk Kabupaten Pesawaran bekerja sekitar 1-34 jam per minggu.”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, penduduk Kabupaten Pesawaran yang bekerja di bawah 35 jam per minggu ada sebanyak 45,48 persen. Penduduk yang bekerja 0 jam adalah termasuk mereka yang sementara tidak bekerja padahal mempunyai pekerjaan, seperti mereka yang sedang cuti, sakit, menunggu panen, dan sebagainya. Sementara itu, persentase penduduk bekerja 35 jam ke atas di Kabupaten Pesawaran sebanyak 54,52 persen.



Grafik 10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Kabupaten Pesawaran, 2021

Persentase penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak berada di Kabupaten Mesuji, sedangkan yang terendah di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, mayoritas penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja 49 jam ke atas terbanyak berada di Kota Bandar Lampung (29,65 persen) dan terendah di Kabupaten Mesuji (15,48 persen).



Grafik 11. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Lampung, 2021

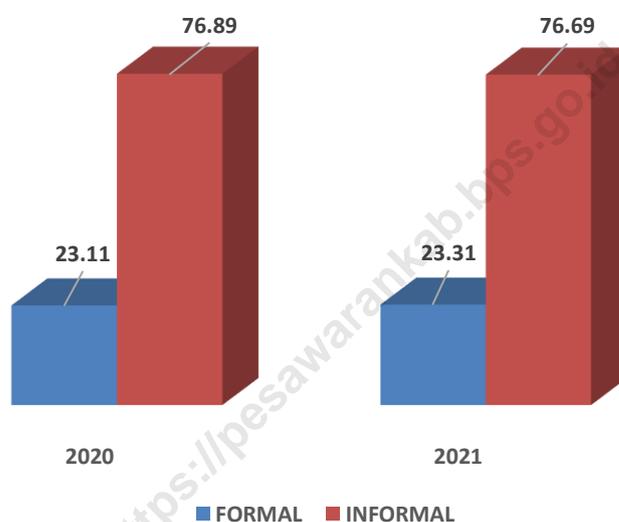
KILM 8. PENDUDUK BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor

informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut, baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder.

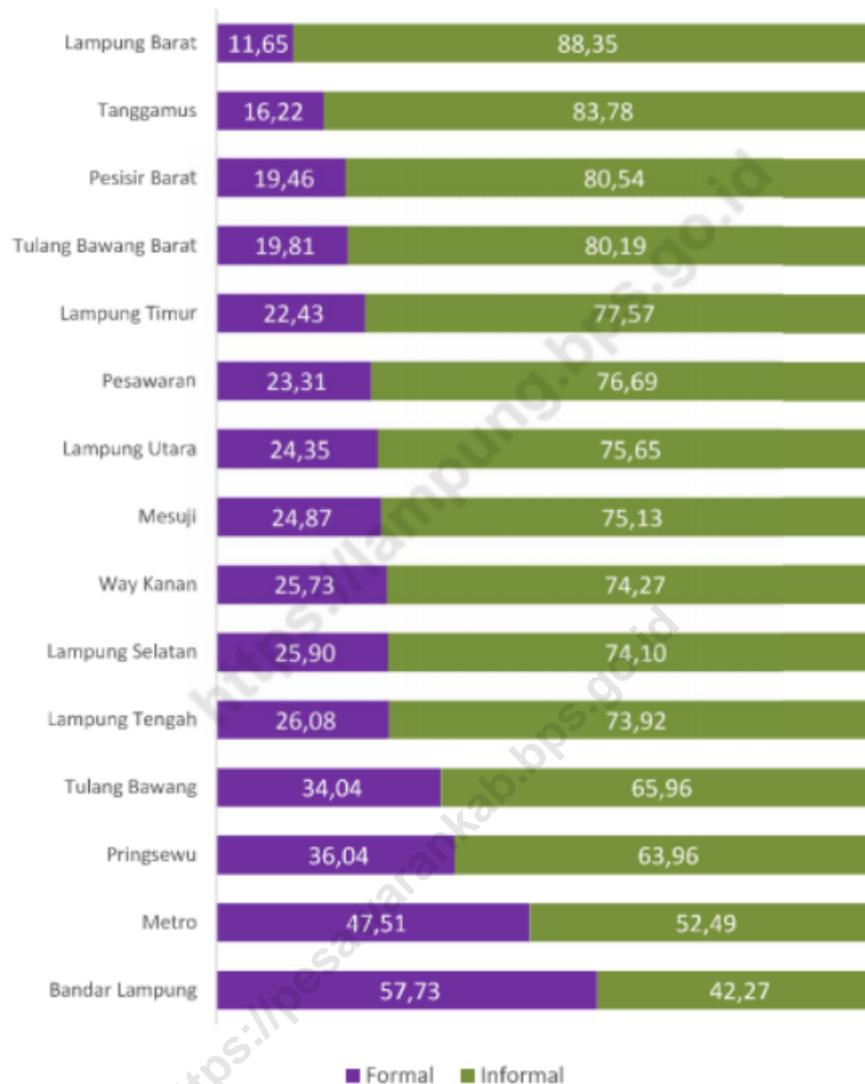
Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

“Agustus 2021: Mayoritas penduduk di Kabupaten Pesawaran bekerja di sektor informal”.



Grafik 12. Persentase Penduduk Bekerja Formal dan Informal di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, Kabupaten Pesawaran didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 76,69 persen. Angka tersebut hampir sama dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, Agustus 2020. Begitupun dengan penduduk yang bekerja di sektor informal, hampir sama, hanya mengalami peningkatan sekitar 0,2 persen.



Grafik 13. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021

Dari Grafik 13 terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor formal tertinggi berada di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 57,73 persen. Kemudian disusul oleh Kota Metro sebesar 47,51 persen. Sementara itu, persentase penduduk bekerja di sektor informal yang tertinggi berada di Kabupaten Lampung Barat, sebesar 88,35 persen kemudian diikuti Kabupaten Tanggamus sebesar 83,78 persen.

BAB
3

INDIKATOR PENGANGGURAN



Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
di Kabupaten
Pesawaran pada
Agustus 2021

4,19 %

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurut jenis kelamin



4,10 %



4,35 %

KILM 9. PENGANGGURAN

“Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesawaran sebesar 4,19 persen”

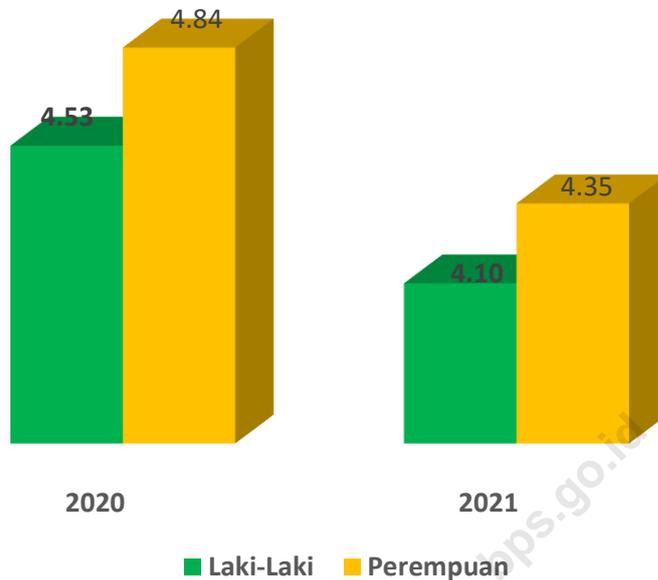
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pesawaran sebesar 4,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran, terdapat sekitar 4 orang yang masuk kategori pengangguran. Penduduk bekerja di Kabupaten Pesawaran ada sebanyak 213,36 ribu penduduk, 137,74 ribu di antaranya penduduk bekerja laki-laki dan 75,62 ribu penduduk bekerja perempuan.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesawaran, 2021

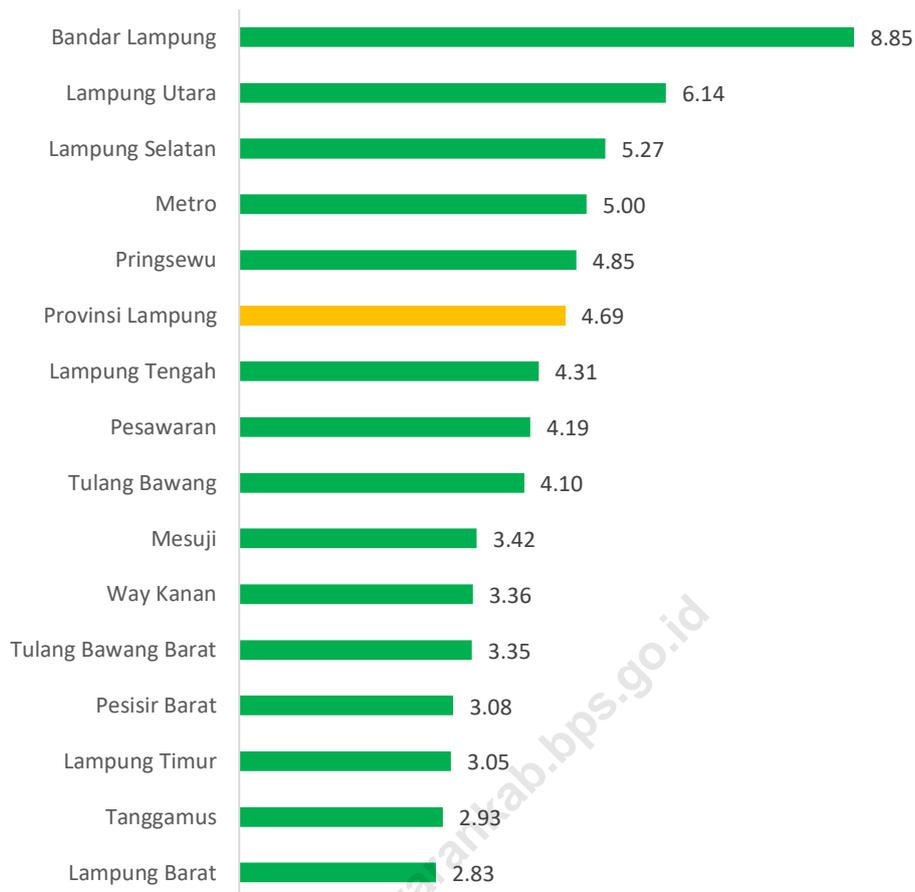
Kategori	Jumlah Penduduk Bekerja (Ribu)	Tingkat Pengangguran Terbuka
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	137,74	4,10
Perempuan	75,62	4,35
Laki-Laki + Perempuan	213,36	4,19

Agustus 2021, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan di Kabupaten Pesawaran lebih tinggi dari pada TPT laki-laki. TPT Perempuan sebesar 4,35 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 4,10 persen. TPT laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Agustus 2020. Pada Agustus 2020, TPT laki-laki sebesar 4,53 persen dan TPT perempuan sebesar 4,84 persen.

**Grafik 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021**



Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung. TPT Bandar Lampung, dari hasil Sakernas Agustus 2021, sebesar 8,85 persen. Sementara itu, TPT Provinsi Lampung hanya sebesar 4,69 persen. Kabupaten/kota lainnya dengan TPT tertinggi, di atas TPT Provinsi Lampung, yaitu Lampung Utara 6,14 persen, Lampung Selatan 5,27 persen, Metro 5,00 persen, dan Pringsewu 4,85 persen. Sementara itu, TPT Pesawaran masih di bawah angka provinsi. Wilayah dengan TPT terendah yaitu Lampung Barat dengan persentase sebesar 2,83 persen.

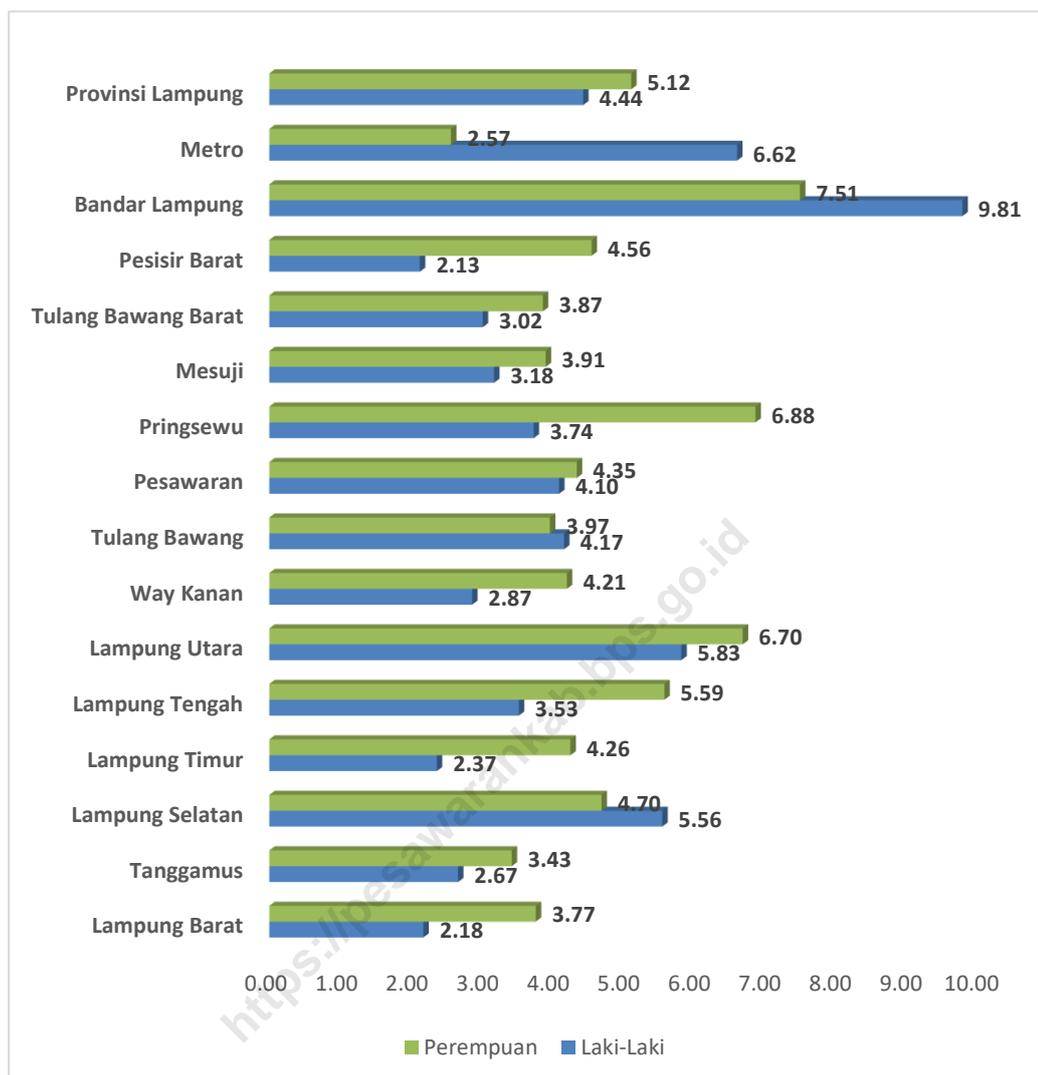


Grafik 15. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, didominasi oleh perempuan. TPT perempuan di Provinsi Lampung sebesar 5,12 persen, sedangkan TPT laki-laki hanya 4,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, terdapat sekitar 5 penduduk yang merupakan pengangguran.

TPT perempuan lebih rendah dari pada laki-laki hanya terjadi di Metro, Bandar Lampung, dan Tulang Bawang, dan Lampung Selatan. TPT laki-laki terbesar berada di Bandar Lampung, yaitu sebesar 9,81 persen. Sementara itu, TPT perempuan tertinggi berada di Pringsewu, yaitu sebesar 6,88 persen.

Grafik 16. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021



KILM 10. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Pengangguran pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak kabupaten/kota yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “umur muda” mencakup orang yang berumur 15 sampai dengan 24 tahun, sedangkan “umur dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

“Persentase penduduk umur muda perempuan yang menganggur lebih tinggi dari pada laki-laki”



Grafik 17. TPT Penduduk Umur Muda di Kabupaten Pesawaran, 2020

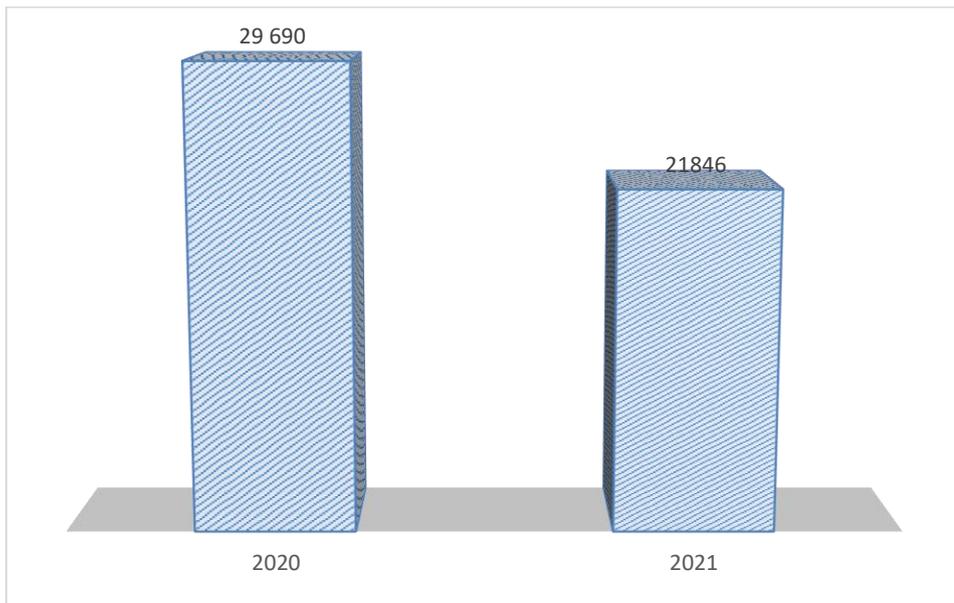
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, TPT penduduk umur muda di Kabupaten Pesawaran sebesar 15,33 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 15 orang yang menganggur. TPT penduduk umur muda laki-laki sebesar 16,63 persen, sedangkan TPT penduduk umur muda perempuan sebesar 13,54 persen.

KILM 12. SETENGAH PENGANGGURAN (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

“Jumlah setengah penganggur di Kabupaten Pesawaran pada Agustus 2021 menurun dibandingkan Agustus 2020”

Berdasarkan Sakernas Agustus 2021, jumlah setengah penganggur Kabupaten Pesawaran sebanyak 21,8 ribu penduduk. Jumlah setengah penganggur tersebut menurun sekitar 7 ribu penduduk dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020.



Grafik 18. Penduduk umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur di Kabupaten Pesawaran, 2020

<https://pesawarankab.bps.go.id>

BAB
4

INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA



Tingkat Ketidakaktifan
di Kabupaten
Pesawaran pada
Agustus 2021

34,58 %

Tingkat Ketidaktifan
menurut jenis kelamin



18,28 %



51,98 %

KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja).

“Agustus 2021: Tingkat ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran sebesar 34,58 persen.”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, tingkat ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran sebesar 34,58 persen. Artinya, dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Pesawaran, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sekitar 34 sampai 35 orang.

Tabel 5. Tingkat Ketidakaktifan di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021

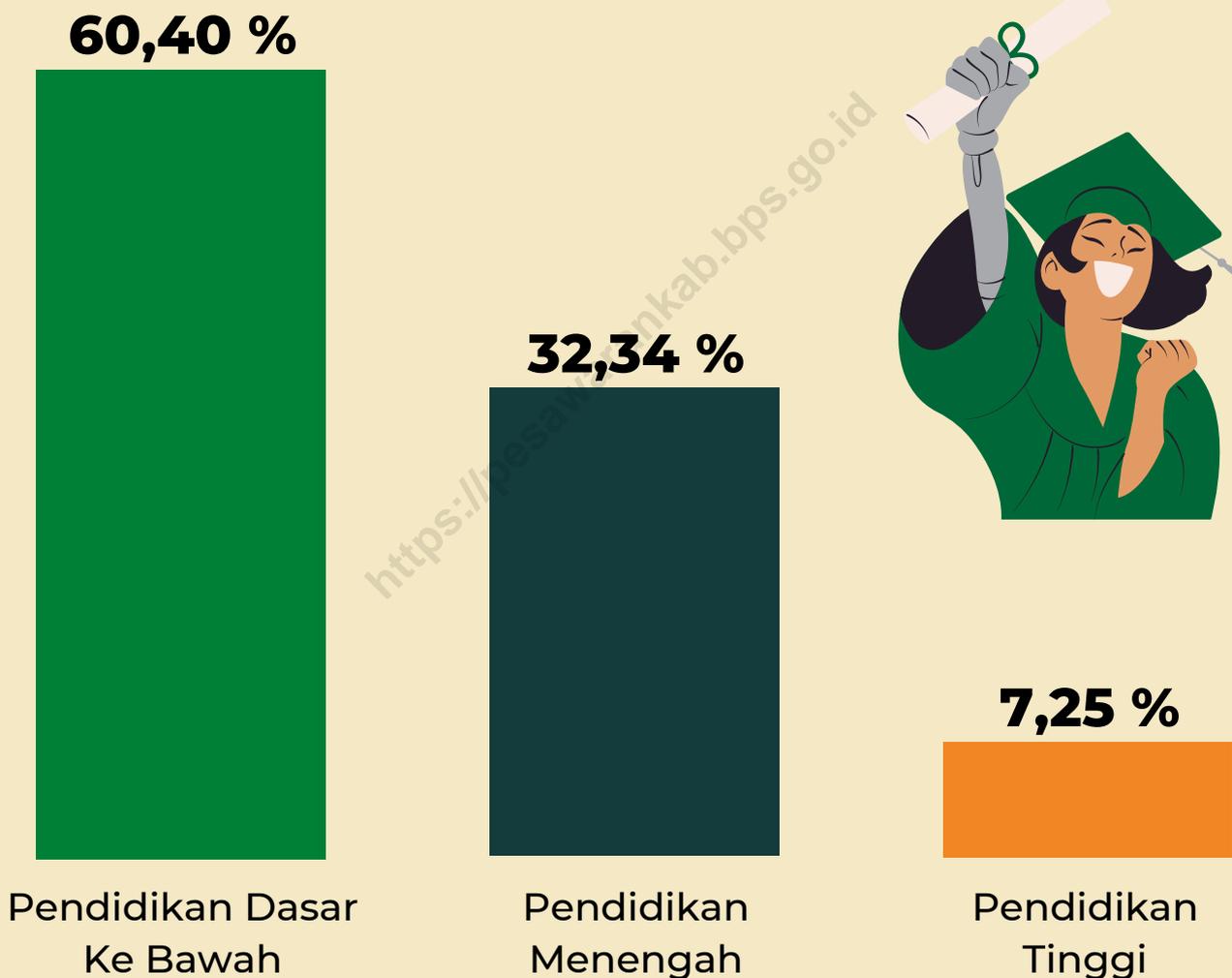
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	14,08	18,28
Perempuan	47,92	51,98
Kab. Pesawaran	30,51	34,58

Tingkat ketidakaktifan pada tahun 2021, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami penurunan. Tingkat ketidakaktifan perempuan, lebih tinggi dari pada tingkat ketidakaktifan laki-laki. Pada tahun 2021, tingkat ketidakaktifan laki-laki hanya sebesar 18,28 persen, sedangkan tingkat ketidakaktifan perempuan sebesar 51,98 persen.

BAB
5

INDIKATOR PENDIDIKAN & MELEK HURUF

Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesawaran 2021



Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar ke bawah, yaitu sebesar 60,40 persen

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Teori *human capital* berpendapat bahwa Pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat. Manfaat tersebut antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan, dan tambahan pendapatan seseorang, apabila mampu menyelesaikan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan Pendidikan di bawahnya.

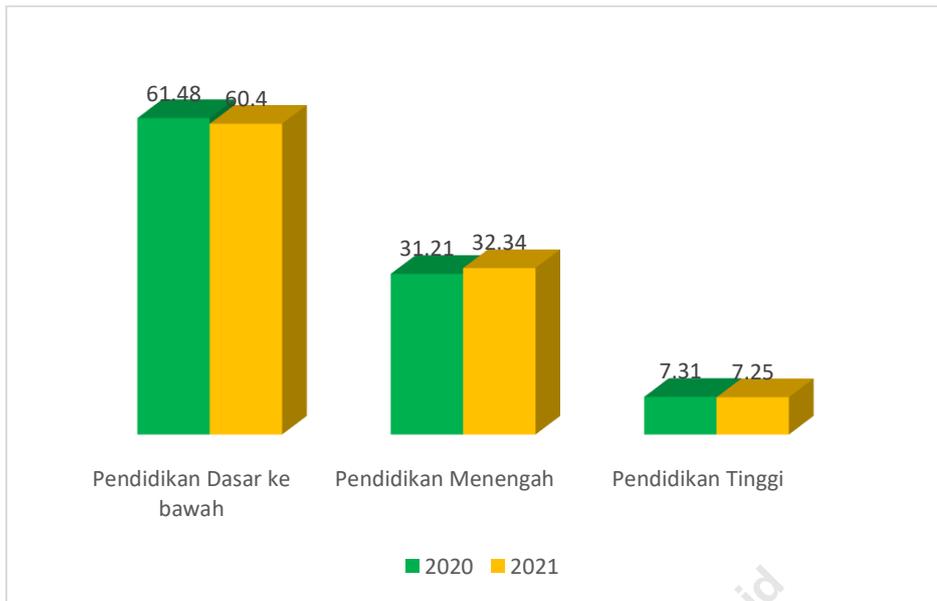
Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula efisiensi dan produktivitas suatu negara.

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu kabupaten/kota untuk bersaing dengan sukses di pasar level provinsi maupun dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat.

KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja. Namun, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

“Agustus 2021: Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar ke bawah, yaitu sebesar 60,40 persen.”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Pesawaran berpendidikan dasar ke bawah, yaitu sebesar 60,40 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Sementara itu, Angkatan kerja yang berpendidikan menengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, angkatan kerja yang menyelesaikan pendidikan menengah sebesar 32,34 persen. Senada dengan angkatan kerja berpendidikan dasar bawah, angkatan kerja sedangkan yang menyelesaikan pendidikan tinggi sebesar 7,25 persen.



Grafik 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesawaran, 2020-2021

<https://pesawarankab.bps.go.id>

BAB

6

INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA



Besaran upah/pendapatan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk bekerja



Rata-rata upah/gaji bersih sebulan tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 2,16 juta rupiah

KILM 15. UPAH DAN BIAYA KOMPENSASI

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja adalah besaran upah/pendapatan. Namun, salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas yaitu hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir pada status pekerjaan tertentu, sehingga pada publikasi ini hanya menyajikan rata-rata upah/gaji sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Sakernas juga tidak mendata biaya kompensasi sehingga indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

Tabel 6. Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai di Kabupaten Pesawaran (Rupiah), 2020-2021

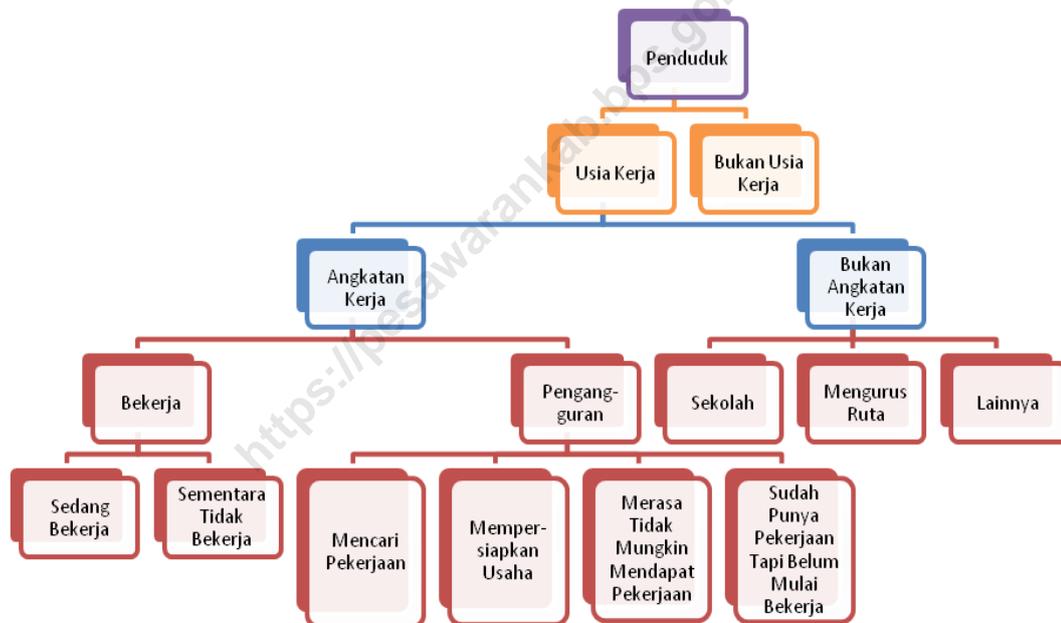
Rata-Rata Upah	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	2 561 330	2 366 684
Perempuan	1 540 795	1 753 493
Total	2 215 179	2 156 596

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai sebesar 2,16 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji pada tahun 2021 ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020. Begitupun dengan rata-rata upah gaji buruh/karyawan/pegawai laki-laki yang turun menjadi 2,37 juta rupiah. Sementara itu, rata-rata upah gaji buruh/karyawan/pegawai laki-laki meningkat menjadi 1,75 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji bersih yang diterima buruh/karyawan/pegawai laki-laki lebih besar dari pada yang diterima buruh/karyawan/pegawai perempuan.

PENJELASAN TEKNIS

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan

penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 5 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumania dan lainnya.

Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya

pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia. Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan

pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi. Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) edisi ke-9 pada tahun 2015, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama), KILM 6 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 7 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 8 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran dan *underemployment* (setengah penganggur), yang terdiri dari KILM 9 (Pengangguran), KILM 10 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 12 (Setengah Pengangguran/*underemployment*);
4. Indikator bukan angkatan kerja (ketidakaktifan), yang terdiri dari KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
5. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
6. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah dan Biaya Kompensasi);
7. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 16 (Produktivitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, penduduk yang bekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 17 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan

analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini dapat tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar;

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi lapangan pekerjaan disajikan dalam 17 kategori yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang berdasarkan *International Standard Industrial Classification (ISIC) revisi 4*. Tujuh belas (17) kategori tersebut yaitu :

- A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- B. Pertambangan dan penggalan;
- C. Industri pengolahan;
- D. Pengadaan listrik dan gas;
- E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor;
- H. Transportasi dan Pergudangan;
- I. Penyediaan akomodasi dan makan minum;

- J. Informasi dan Komunikasi;
- K. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- L. Real Estat;
- M, N. Jasa Perusahaan;
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- P. Jasa Pendidikan;
- Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- R,S,T,U. Jasa lainnya.

KILM 5. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada ISCO 2008 dengan uraian jenis pekerjaan lebih rinci. Dalam penyajian publikasi ini klasifikasi tersebut dikonversikan ke Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) 1982. Dengan kategori sebagai berikut:

- 0/1. Tenaga professional, teknisi, dan yang sejenis;
- 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan;
- 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis;
- 4. Tenaga usaha penjualan;
- 5. Tenaga usaha jasa;
- 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar;
- X/00. Lainnya.

KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): 0 jam, 1-34 jam, 35-48 jam, dan 49 jam ke atas.

KILM 8. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama (ICLS ke-13). Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam

praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dan sebagainya)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

Data pekerja sector informal yang mengacu pada ICLS ke-17 belum dapat disajikan BPS karena keterbatasan variable yang dikumpulkan dalam Sakernas. Oleh sebab itu, BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama.

KILM 9. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 7 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 7 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 11. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan $1 - \text{TPAK}$.

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita dapat berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika

laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

1. Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
3. Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK dan Paket C;
4. Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/S1, dan S2/S3.

KILM 15. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja

Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)-yang bukan merupakan bagian dari Sakernas-

yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Biaya kompensasi tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 17. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesawaran**